

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LUAS
PENGUNGKAPAN BELANJA HIBAH
PEMERINTAH DAERAH**

Oleh:

HAPSARI OKTAVIANA

NIM : 232010149

KERTAS KERJA

Diajukan kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Guna Memenuhi Sebagian dari

Persyaratan – persyaratan untuk Mencapai

Gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI



**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA**

2014



PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAPSARI OKTAVIANA
NIM : 232010149 Email : 232010149@student.uksw.edu
Fakultas : Ekonomika dan Bisnis Program Studi : Akuntansi
Judul tugas akhir : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Belanja Hibah
Pemerintah Daerah
Pembimbing : Gustin Tanggulangan, SE.,M.Ak,Akt.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar keserjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, 3 Februari 2014



HAPSARI OKTAVIANA



PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAPSARI OKTAVIANA
NIM : 232010149 Email : 232010149@student.uksw.edu
Fakultas : Ekonomika dan Bisnis Program Studi : Akuntansi
Judul tugas akhir : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Belanja Hibah
Pemerintah Daerah

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif** kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA**

** Hak yang tidak terbataskannya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.*

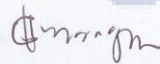
*** Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing TA dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 3 Februari 2014


Hapsari Oktaviana

Mengetahui,



Gustin Tanggulangan, SE.,M.Ak.Akt.

Pembimbing



FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Jl. Diponegoro 52 – 60
Tlp: (0298) 321212, 311881
Salatiga, 50711 - Indonesia
Fax. (0298) – 21433

PERNYATAAN KEASLIAN KERTAS KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hapsari Oktaviana
NIM : 232010149
Program Studi : Akuntansi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Kristen Satya Wacana
Salatiga

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi :

Judul : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas
Pengkungan Belanja Hibah Pemerintah Daerah

Pembimbing : Gustin Tanggulangan, SE.,M.Ak,Akt.

Tanggal diuji : 29 Januari 2014

adalah benar – benar karya saya.

Didalam kertas kerja ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan atau gagasan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang saya aku seolah – olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah – olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh.

Salatiga, 8 Januari 2014
Yang memberi pernyataan,

Hapsari Oktaviana

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LUAS
PENGUNGKAPAN BELANJA HIBAH
PEMERINTAH DAERAH**

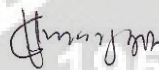
Oleh:
HAPSARI OKTAVIANA
NIM : 232010149

KERTAS KERJA

Diajukan kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Guna Memenuhi Sebagian dari
Persyaratan – persyaratan untuk Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

Disetujui oleh:


1956

Gustin Tanggulungan, SE.,M.Ak,Akt.

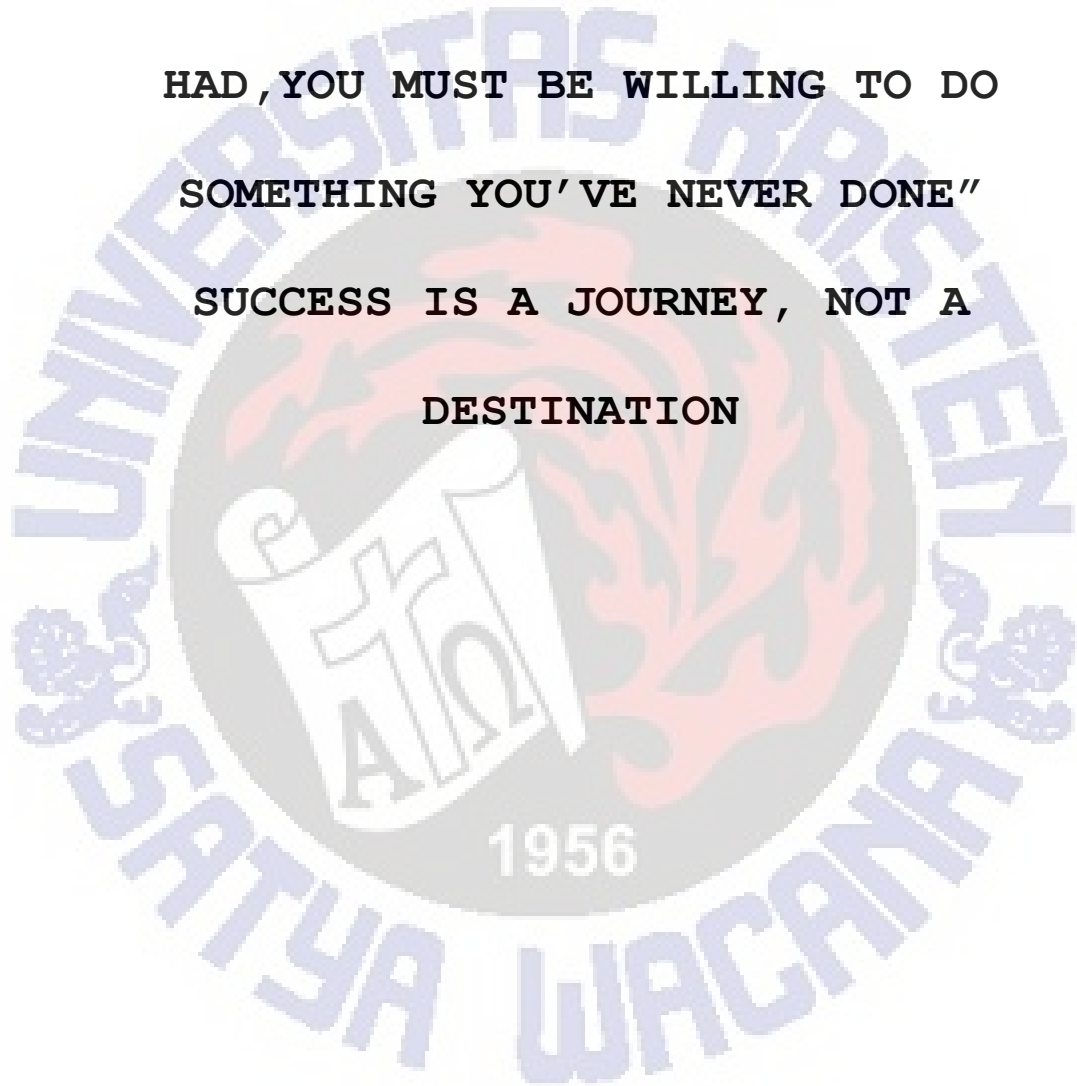
Pembimbing

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA**

2014

HALAMAN MOTTO

**"IF YOU WANT SOMETHING YOU'VE NEVER
HAD, YOU MUST BE WILLING TO DO
SOMETHING YOU'VE NEVER DONE"
SUCCESS IS A JOURNEY, NOT A
DESTINATION**



Abstract

Disclosure of financial statements is one of the mechanisms to improve the transparency of financial management and improve accountability managers. This research aims to identify the factors that affect the broad disclosure CaLK grant expenditures on local government. The study sample as many as 86 local government on the island of Java are local government financial statements have been audited and published on the website of the BPK and the KPU website that has a data acquisition political party chairs. Analysis of data by multiple linear regression techniques. The results showed that intergovernmental revenue positive and significant effect on the extensive disclosures grant expenditures while the marginal effect of political competition. As for the debt financing does not affect the broad disclosure of spending this grant is tied to government funding that occurs in a very small, so that the activities financed through debt amount is small. Thus it is possible debt financing can not put pressure on local governments to improve the disclosure of grant expenditures. The average level of disclosure is low so it needs to be regulated in order to improve the transparency of financial management in local government .

Keywords : Disclosure , Financial Statements , Local Government , grant expenditures

SARIPATI

Pengungkapan laporan keuangan adalah salah satu mekanisme untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara dan meningkatkan akuntabilitas pengelolanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan belanja hibah pada CaLK Pemerintah daerah. Sampel penelitian sebanyak 86 pemerintah daerah yang berada di Pulau Jawa yakni pemda yang laporan keuangannya telah diaudit dan dipublikasikan pada website BPK serta pada website KPU memiliki data perolehan kursi partai politik. Analisis data dengan teknik regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan belanja hibah sedangkan kompetisi politik berpengaruh secara marjinal. Adapun pembiayaan utang tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan belanja bantuan hibah hal ini diduga terkait dengan pembiayaan yang terjadi di Pemerintah daerah sangat kecil, sehingga kegiatan yang dibiayai melalui hutang jumlahnya kecil. Dengan demikian dimungkinkan pembiayaan utang tidak dapat memberikan tekanan kepada Pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan belanja hibah. Rata-rata tingkat pengungkapan masih rendah sehingga perlu diregulasi dalam rangka meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan di pemerintah daerah.

Kata kunci: Pengungkapan, Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah, belanja hibah

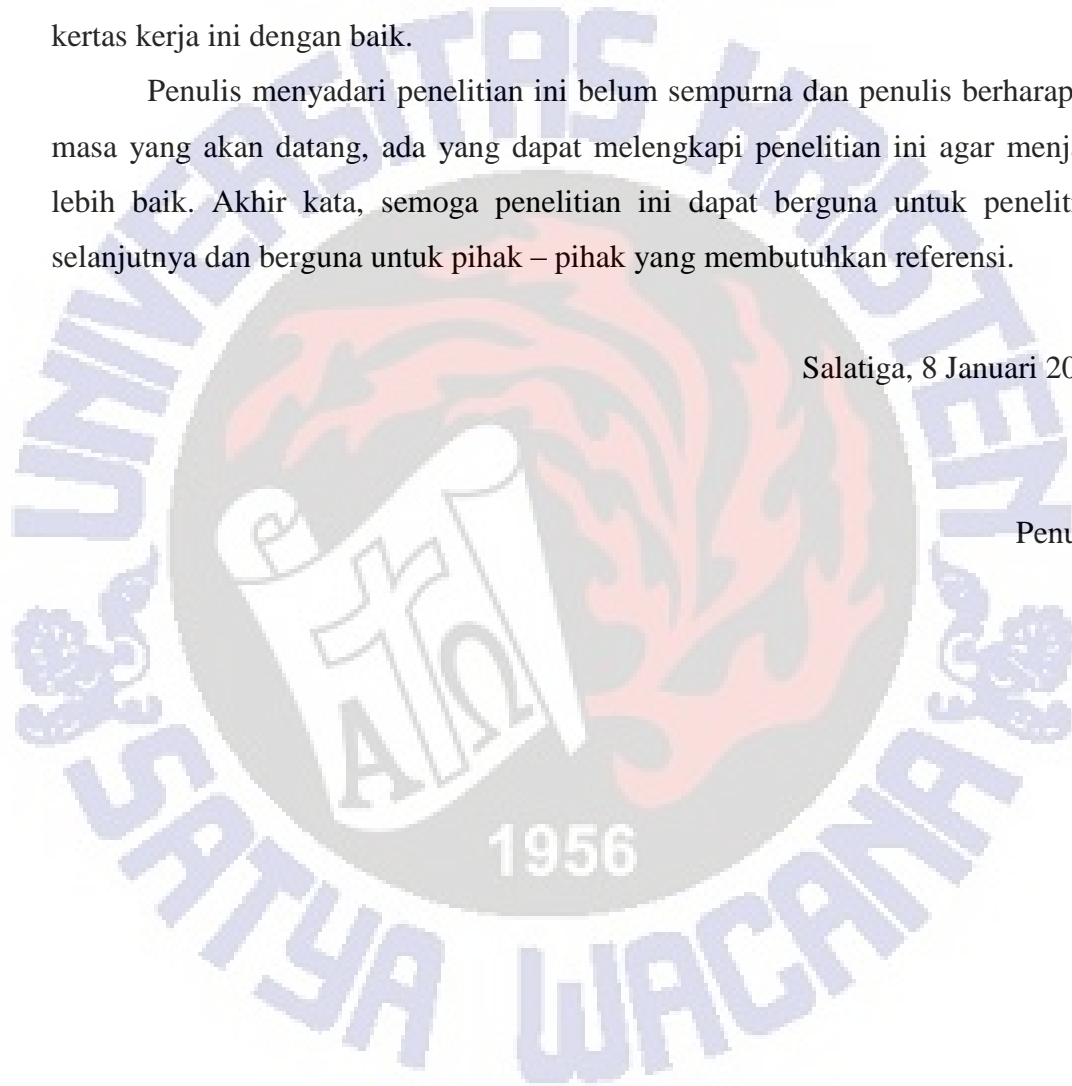
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan kertas kerja ini dengan baik.

Penulis menyadari penelitian ini belum sempurna dan penulis berharap di masa yang akan datang, ada yang dapat melengkapi penelitian ini agar menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat berguna untuk penelitian selanjutnya dan berguna untuk pihak – pihak yang membutuhkan referensi.

Salatiga, 8 Januari 2014

Penulis



UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari dalam penyusunan penelitian ini tidak bisa diselesaikan oleh penulis sendiri. Berbagai pihak terlibat dalam pembuatan penelitian ini baik dengan cara memberi motivasi, bimbingan dan lain – lain. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penelitian ini :

1. Ibu Gustin Tanggulangan, SE,.M.Ak,Akt. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar selalu memberi nasehat, arahan, dan petunjuk kepada penulis.
2. Ibu Istiarsi Sapturi Sri Kawuryan, SE., MSP selaku wali studi yang membantu penulis selama kuliah di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW.
3. Seluruh pengajar dan staff pegawai FEB UKSW yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
4. Orangtua dan adikku. Bapak Widadi, Ibu Wahyu Erna Wati, Spd serta Afif Widyawan yang selalu memberikan segenap kasih sayang, cinta, nasehat, motivasi dan doa
5. Albert Joshua Oktaviawan atas bantuan, motivasi, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
6. Sahabat penulis selama berkuliah, Nandy, Venti, Nino, Syarif, Andra, Lidia, Diana serta teman-teman yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Terima kasih atas persahabatan, masukan dan kebersamaan selama ini.
7. Teman-teman FEB 2010 ,yang selalu kompak dan saling memotivasi.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua bantuannya.

DAFTAR ISI

Judul	i
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Abstract	v
Saripati	vi
Kata Pengantar	vii
Ucapan Terima Kasih.....	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiii
Pendahuluan	1
Kerangka Teoritis	3
<i>Agency Theory</i>	3
Pengungkapan Belanja Hibah	4
Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Pengungkapan Hibah	5
Pengaruh <i>Intergovernmental Revenue</i> terhadap Pengungkapan Hibah	6
Pengaruh Pembiayaan Utang terhadap Pengungkapan Hibah	7
Metode Penelitian	8
Populasi dan Sampel	8
Jenis Data dan Sumber Data	8
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	9
Metode Analisis Data	10
Analisis dan Pembahasan	12
Deskripsi Sampel Penelitian	12
Analisis Data	12
Hasil Uji Hipotesis	15
Pembahasan	16
Penutup	18

Kesimpulan	18
Implikasi	19
Keterbatasan dan Saran untuk Penelitian Mendatang	20
Daftar Pustaka	21
Lampiran	23



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Proses Seleksi Sampel.....	8
Tabel 2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	9
Tabel 3 Statistik Deskriptif Variable Dependen	12
Tabel 4 Jumlah Pemda yang Melakukan Pengungkapan item Belanja hibah.....	12
Tabel 5 Statistik deskriptif Variable Independen.....	13
Tabel 6 Model Penelitian	15
Tabel 7 Hasil Uji Hipotesis	15
Tabel 8 Hasil Uji Bersama-sama.....	16
Tabel 9 Koefisien Determinasi	16



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Penelitian



PENDAHULUAN

Perhatian terhadap isu transparansi di Indonesia semakin meningkat. Salah satu indikatornya ialah dikeluarkannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur bahwa seluruh jajaran pejabat publik harus lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya (Sinaga, 2011). Menurut Mulyana (2006) salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan permintaan transparansi keuangan daerah ialah krisis kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh Pemerintah. Disamping itu, desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu cara mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan adalah dengan meningkatkan pengungkapan informasi laporan keuangan. Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan salah satu prinsip pelaporan keuangan pemerintah adalah pengungkapan lengkap (*full disclosure*), dimana laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi-informasi bagi pengguna pada lembar muka laporan keuangan dan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Anggaran hibah adalah salah satu pos belanja Pemerintah yang menurut PP No. 58 tahun 2005 digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Hasil kajian KPK terhadap kebijakan Pemerintah daerah pada periode Januari-Maret 2011 menemukan adanya sejumlah kasus penyalahgunaan keuangan negara yang terkait regulasi dan tatalaksana pengelolaan dana hibah. Adapun penyajian pos belanja hibah pada laporan keuangan Pemda sangat beragam sehingga penggunaannya tidak dapat dikontrol dengan baik. Hal ini berkaitan dengan tidak diaturnya pengungkapan secara terinci pada level nasional sehingga tingkat pelaporan sangat bergantung pada kebijakan masing-masing

Pemerintah daerah. Bahkan masih banyak Pemerintah daerah yang belum mengungkapkan rincian belanja hibah pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meskipun Buletin Teknis 04, telah mengatur informasi tambahan atas pos belanja yang perlu diungkapkan dalam CaLK sekurang-kurangnya mencakup rincian belanja menurut organisasi, rincian belanja menurut fungsi, rincian belanja menurut program dan kegiatan, serta rincian belanja menurut urusan pemerintahan.

Ingram (1984) telah menguji adanya hubungan antara faktor ekonomi serta variasinya terhadap praktik akuntansi di pemerintahan di negara bagian di Amerika Serikat. Empat faktor ekonomi dan politik yang diteliti mencakup *coalition of voters, administrative selection process, alternative information source, dan management incentive*. Demikian pula penelitian Darmastuti (2012) menunjukkan bahwa karakteristik Pemerintah daerah berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial Pemerintah daerah di Indonesia. Faktor yang paling berpengaruh menurut Darmastuti adalah pengawasan dari lingkungan eksternal Pemda.

Lesmana (2010) menjelaskan karakteristik Pemerintah daerah bersifat khas dari otoritas administratif masing-masing Pemerintah daerah. Karena ketidakseragaman regulasi terkait belanja hibah, pengungkapan belanja hibah yang dilakukan Pemerintah daerah juga tidak seragam. Hal ini diduga dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing Pemerintah daerah.

Darmastuti (2012), telah membuktikan bahwa 2 dari karakteristik Pemerintah Daerah yaitu *intergovernmental revenue* dan pembiayaan utang berpengaruh terhadap Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial. Namun, ternyata pos belanja hibah juga memiliki masalah regulasi yang sama dengan belanja bantuan sosial. Penelitian ini yang ingin menguji kesesuaian hasil pengungkapan belanja bantuan sosial dan pengungkapan belanja hibah sehingga penelitian ini menggunakan 2 variable yang telah terbukti berpengaruh yaitu *intergovernmental revenue* dan pembiayaan utang dengan menambahkan 1 variable independen yaitu kompetisi politik yang juga termasuk dalam karakteristik Pemerintah daerah,

karena diduga pengawasan dari lawan-lawan politik akan membuat suatu Pemerintah daerah untuk lebih terbuka dan melakukan transparansi belanja hibah.

Penelitian ini bertujuan menguji apakah karakteristik Pemerintah daerah berpengaruh terhadap luas pengungkapan belanja hibah Pemerintah daerah pada periode belum adanya Permendagri tentang pengungkapan belanja hibah. Untuk itu rumusan persoalan penelitian adalah apakah kompetisi politik, *intergovernmental Revenue*, dan pembiayaan utang berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan belanja hibah? Penelitian ini diharapkan bermanfaat pihak regulator terkait belanja hibah dalam rangka mengurangi penyalahgunaan keuangan negara. Penelitian ini juga diharapkan berkontribusi bagi pengembangan pengetahuan dan praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (PSAP 1). Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, sehingga *agent* tidak selamanya mengikuti keinginan *principal*. Hubungan tersebut juga terjadi pada Pemerintahan, dimana Pemerintah daerah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*. Pemerintah dapat membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan pejabat dengan mengesampingkan kesejahteraan masyarakat yang dilayani. Untuk mengurangi konflik tersebut, diperlukan pengawasan oleh *principal* atas apa saja yang dilakukan oleh *agent*.

Laporan keuangan dan pengungkapan yang transparan ke publik adalah salah satu cara untuk mengurangi *agency cost*. Darrough (1993) mengemukakan ada dua jenis pengungkapan, yang pertama adalah Pengungkapan wajib (*mandated disclosure*), merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku dan yang kedua Pengungkapan Sukarela (*Voluntary disclosure*), merupakan pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh pemerintah tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

Pengungkapan Belanja Hibah

Pengungkapan belanja hibah dalam CaLK hingga tahun 2011 termasuk pengungkapan sukarela oleh karena belum ada pengaturan secara jelas dan detail tentang pengungkapan bantuan hibah sehingga tidak ada pedoman yang seragam bagi Pemda tentang pengungkapan belanja hibah. Demikian juga halnya dengan penganggaran dan pelaksanaan belanja hibah. Bahkan ada kecenderungan politik anggaran pada saat menjelang pemilihan umum kepada daerah. Disisi lain DPRD kesulitan melaksanakan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan terkait dengan hibah. Permasalahan yang timbul terkait dengan penganggaran dan pelaksanaan hibah, menimbulkan potensi penyalahgunaan anggaran untuk sesuatu yang tidak tepat. Untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat juga telah meminta Pemerintah untuk menyusun pedoman yang dapat memberikan definisi dan perlakuan akuntansi yang jelas terkait belanja hibah.

Pemerintah daerah membuat kebijakannya masing-masing atas belanja hibah didasari pada beberapa peraturan. Peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2008 .

Pasal 26 ayat 7 huruf F dari PP No. 58 tahun 2005 menyebutkan bahwa hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Adapun

Permendagri No. 13 tahun 2006 pasal 44, Belanja hibah kepada pemerintah dikelola sesuai dengan mekanisme APBN, serta hibah kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada perusahaan daerah, badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan dikelola dengan mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 133 menyebutkan bahwa penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah. Peraturan-peraturan tersebut memberi rambu-rambu umum tentang belanja hibah namun belum secara jelas mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pencatatan, serta pengungkapan atas belanja hibah. Dan dalam Buletin Teknis 04 juga telah mengatur informasi tambahan atas pos belanja yang perlu diungkapkan dalam CaLK sekurang-kurangnya mencakup rincian belanja menurut organisasi, rincian belanja menurut fungsi, rincian belanja menurut program dan kegiatan, serta rincian belanja menurut urusan pemerintahan.

KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Luas Pengungkapan Belanja Hibah

Pemerintahan daerah yang memiliki kompetisi politik yang tinggi memiliki kecenderungan menyediakan informasi (Baber, 1983 dalam Laswad, dkk 2005). Hal yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian Ingram (1984), Evans dan Patton (1987), Giroux (1989). Baber (1983) dalam Laswad (2005) menyatakan bahwa kepala daerah terpilih dari suatu pemerintahan daerah yang berkompetisi politik tinggi menanggung biaya jangka panjang yang tinggi dalam hal pemenuhan janji-janji sebelum pemilihan. Kepala daerah terpilih juga menanggung biaya pengawasan (*monitoring cost*) yang lebih besar dikarenakan lebih banyak pihak yang mengawasinya. Lebih lanjut Baber dan Sen (1984) dalam Laswad, dkk (2005) menyatakan kepala daerah terpilih dari suatu pemerintahan daerah yang berkompetisi politik tinggi lebih rentan terhadap klaim atau kritikan saingan politiknya.

Kepala daerah yang lahir dari kompetisi politik yang tinggi ingin menunjukkan realiasi janji-janji sebelum pemilihan kepada masyarakat dan lawan-lawan politiknya melalui pelaporan kinerja yang baik. Salah satu bentuk pelaporan kinerja adalah peningkatan transparansi pelaporan belanja hibah karena pos tersebut menjadi perhatian masyarakat luas akibat temuan-temuan KPK pada tahun 2011 terkait korupsi belanja hibah. Sehingga, diduga bahwa semakin tinggi kompetisi politik maka semakin luas pengungkapan belanja hibah pada CaLK pemerintah daerah.

Hal = Tingkat kompetisi politik berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan belanja hibah

Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Luas Pengungkapan Belanja Hibah

Patrick (2007) mendefinisikan *intergovernmental revenue* sebagai transfer dana dari Pemerintah pusat dan Pemerintah federal kepada Pemerintah daerah. Dana perimbangan adalah berupa *intergovernmental revenue* di Indonesia yang merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan dalam era otonomi daerah yang semakin luas. Sumarjo (2010) memproksikan *intergovernmental revenue* dengan rasio dana perimbangan. Darmastuti (2012) menemukan adanya pengaruh positif *intergovernmental Revenue* terhadap pengungkapan rincian belanja bantuan sosial. Darmastuti (2012) mengukur rasio *intergovernmental revenue* dengan membandingkan antara jumlah dana perimbangan dari pusat dengan total pendapatan. Dalam kaitan dengan pengungkapan wajib oleh Pemda, Suhardjano (2010) menemukan adanya pengaruh positif *intergovernmental revenue* terhadap tingkat pengungkapan wajib Pemerintah Daerah. Artinya semakin besar tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat maka semakin luas pengungkapan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait.

Pemerintah daerah yang memiliki *intergovernmental revenue* tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki tingkat

ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat untuk pembiayaan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah akan terdorong untuk meningkatkan transparansi penggunaan dana yang diperolehnya dalam rangka meningkatkan kepercayaan dari pemerintah pusat dan menunjukkan kepatuhan pada peraturan terkait. Pengungkapan secara rinci atas belanja hibah adalah salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan khususnya pada periode hingga tahun 2011 yakni ketika belanja hibah banyak menjadi polemik. Oleh karena itu dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Ha2 = Intergovernmental revenue berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan belanja hibah

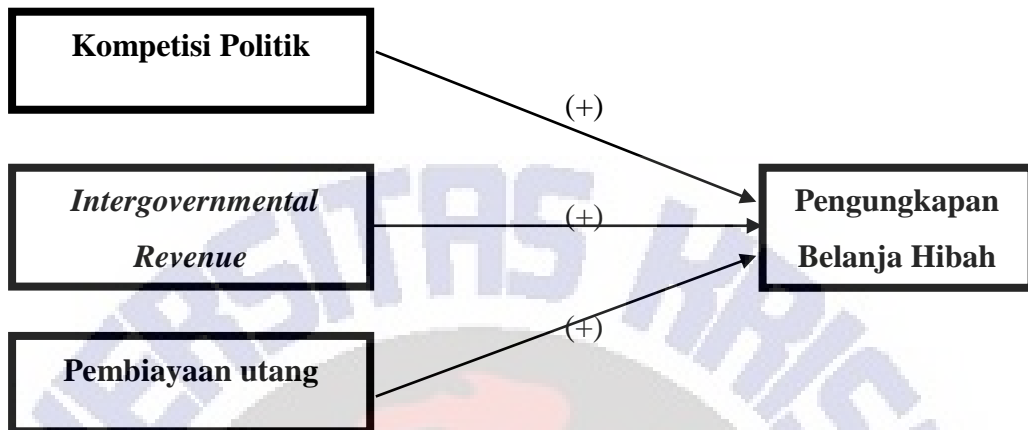
Pengaruh Pembiayaan Utang terhadap Luas Pengungkapan Belanja Hibah

Kewajiban atau utang merupakan transaksi yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber ekonomi pemerintah (SAP No. 09). Darmastuti (2012) menguji pengaruh pembiayaan utang terhadap tingkat pengungkapan belanja bantuan sosial. Penelitian tersebut menemukan adanya pengaruh pembiayaan utang terhadap tingkat pengungkapan rincian belanja bantuan sosial pada CaLK. Darmastuti (2012) mengukur pembiayaan utang dengan membandingkan total kewajiban dibagi total ekuitas.

Pemerintah daerah yang memiliki pembiayaan utang yang tinggi mengindikasikan adanya ketergantungan pendanaan kepada pihak eksternal. Ketergantungan pada sumber pembiayaan eksternal akan mendorong organisasi untuk menginformasikan kemampuan tata kelola organisasi dengan baik untuk memberi jaminan akan kemampuan organisasi untuk mengembalikan kewajibannya yang jatuh tempo. Tata kelola yang baik salah satunya adalah kepatuhan pemerintah pada penggunaan pos dana hibah sebagaimana rambu-rambu dalam regulasi yang ada. Oleh karena itu dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Ha3 = Pembiayaan utang berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan belanja hibah

Hubungan diantara berbagai variabel yang hendak diuji dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam model berikut ini :



METODOLOGI PENELITIAN

Data penelitian

Data penelitian adalah data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2011 yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta data kompetisi politik dari *website* KPU dan *www.jariungu.com*

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa karena diduga karakteristik Pemerintah Daerah di Pulau Jawa hampir sama. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut :

TABEL 1
Proses Seleksi Sampel

KETERANGAN	JUMLAH
Jumlah Pemda pada Propinsi Di Pulau Jawa pada tahun 2011	111
Jumlah Pemda yang data partai pendukung pemenang kepala daerah dan jumlah kursi DPRD untuk tahun 2011 tidak diinformasikan di <i>website</i> Komisi Pemilihan Umum	(25)
Sampel terpilih	86

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2

TABEL 2
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator Empiris
1	Pengungkapan Belanja Hibah dalam CaLK (Y)	Gambaran jumlah rincian pengungkapan pos belanja hibah yaitu pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkapan Rincian belanja menurut organisasi 2. Pengungkapan Rincian belanja menurut fungsi dan klasifikasi belanja, 3. Pengungkapan Rincian belanja menurut program dan kegiatan, 4. Pengungkapan Rincian belanja menurut urusan pemerintahan, 5. Pengungkapan Rincian belanja menurut belanja langsung dan belanja tidak langsung 6. Pengungkapan Penjelasan lain untuk <i>full disclosure</i>
2	Kompetisi Politik (X1)	Gambaran seberapa besar persaingan politik berdasarkan jumlah kursi diparlemen dari partai pendukung kepala daerah (<i>incumbent</i>) dibandingkan total kursi di parlemen	$\frac{\text{Jumlah Kursi Pendukung Kepala daerah terpilih}}{\text{Jumlah Kursi Parlemen}}$
3	<i>Intergovernmental Revenue</i> (X2)	Gambaran perbandingan jumlah dana transfer dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah dengan total pendapatan Pemda	$\frac{\text{Dana Perimbangan dari pusat}}{\text{Total Pendapatan}}$
4	Pembiayaan Utang (X3)	Gambaran kemampuan pengembalian hutang pemerintah daerah	$\frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}}$

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda (*multiple regression*), sedangkan pengolahan data menggunakan bantuan program SPSS for windows versi 16.0

Model Pengujian Regresi Berganda

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = pengungkapan belanja hibah

X_1 = Kompetisi Politik

α = Konstanta

X_2 = Intergovernmental Revenue

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien regresi variabel independen

X_3 = Pembiayaan Utang

e = Error term

Pengujian Hipotesis

Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan variabel independen (kompetisi politik, *intergovernmental revenue* dan pembiayaan utang) terhadap variabel dependen (luas pengungkapan belanja hibah) secara parsial.

Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji t dan uji F ditentukan pada tingkat kepercayaan 95% dan tingkat signifikan 5%.

Koefisien Determinasi (R^2)

Identifikasi koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Pada lampiran 6 tabel 10 terlihat nilai signifikansi 0,772 lebih dari 0,05. Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

b. Uji Mutikoleniaritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Apabila nilai-nilai tolerance mendekati angka 1 dan VIF

dibawah 5, maka terjadi multikol yang berbahaya (Ghozali, 2006). Pada lampiran 6 tabel 11, VIF dan tolerance mengindikasikan tidak terdapat multikolinearitas yang serius. Nilai VIF tidak ada yang melebihi 10 dan nilai tolerance tidak ada yang kurang dari 0,10

c. Uji Heteroskastisitas (*Uji Park*)

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan *Uji Park* (Ghozali, 2006). Jika parameter beta tidak signifikan secara statistik atau lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi. Pada lampiran 6 tabel 12 menunjukkan bahwa signifikansi pada masing-masing variabel lebih dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada penelitian ini.

ANALISIS DATA

Statistik Deskriptif

Pada Tabel 3 terlihat masih ada pemda yang tidak melakukan pengungkapan di CaLK atas Belanja Hibah dan ada pula yang telah melakukan mengungkapkan secara maksimum yaitu 6 item yang mencakup rincian belanja menurut organisasi, rincian belanja menurut fungsi, rincian belanja menurut program dan kegiatan, serta rincian belanja menurut urusan pemerintahan. Pada tabel 2 terlihat prosentase standar deviasi terhadap *mean* adalah 50,57 persen (lebih dari 50 persen) mengindikasikan adanya variasi data yang signifikan. Artinya pengungkapan belanja hibah pada 2011 ketika masih bersifat *voluntary disclosure* sangat bervariasi.

TABEL 3
Statistik Deskriptif variabel dependen

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DISCLOSURE	86	0	6	3.14	1.588
Valid N (listwise)	86				

Item rincian pengungkapan belanja hibah yang paling sering diungkapkan adalah item rincian belanja menurut organisasi sedangkan item yang paling jarang diungkapkan adalah pengungkapan penjelasan lain untuk *full disclosure* (tabel 4)

TABEL 4
Jumlah Pemda yang Melakukan Pengungkapan Belanja Hibah

Item Pengungkapan	Jumlah
Pengungkapan Rincian belanja menurut organisasi	86%
Pengungkapan Rincian belanja menurut program dan kegiatan	67,44%
Pengungkapan Rincian belanja menurut urusan pemerintahan	61,62%
Pengungkapan Rincian belanja menurut fungsi dan klasifikasi belanja	51,16%
Pengungkapan Rincian belanja menurut belanja langsung dan belanja tidak langsung	26,74%
Pengungkapan Penjelasan lain untuk <i>full disclosure</i>	20,93%

Pada tabel 5 terlihat prosentase standar deviasi terhadap *mean* adalah 38,63 persen (kurang dari 50 persen) mengindikasikan tidak adanya variasi data yang signifikan. Berdasarkan tabel 5 juga dapat disimpulkan rata-rata kompetisi politik pemerintah daerah di Pulau Jawa sebesar 36%.

TABEL 5
Statistik deskriptif variable independen

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
POLCOM	86	.10	.89	.3639	.14058
IR	86	.27	.78	.6467	.07274
UTANG	86	.0000	.0431	.004416	.0063543
Valid N (listwise)	86				

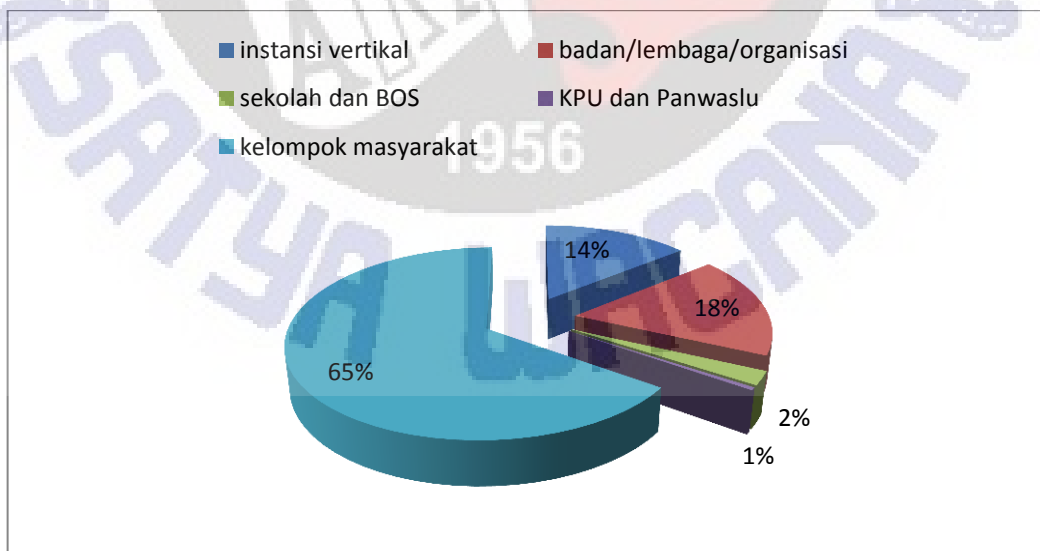
Intergovernmental revenue pemerintah daerah di Pulau Jawa menunjukkan tidak ada terjadi variasi data yang signifikan. Dapat dilihat pada tabel 4 terlihat

prosentase standar deviasi terhadap *mean* adalah 11,25 persen (kurang dari 50 persen) .Dari hasil pengujian ini dapat pula disimpulkan bahwa pemerintah daerah di pulau Jawa masih bergantung pada tranfer dari pusat, hal ini dapat dilihat dari rata rata intergovernmental revenue sebesar 0,6467, artinya rata-rata pemerintah daerah di pulau Jawa masih bergantung pada transfer dari pusat sebesar 64%.

Pembiayaan utang yang diukur menggunakan proksi total kewajiban dibagi dengan total ekuitas. Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada tabel 4, nilai rata-rata pembiayaan utang Pemerintah daerah di Kabupaten/ Kota di Pulau Jawa adalah sebesar 0,4 %. Sedangkan maksimum 4,4% dan minium 0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan utang pemerintah daerah di pulau Jawa sangat kecil

Pada Grafik 1 terlihat penerima belanja hibah terbesar pada tahun 2011 di Pulau Jawa adalah kelompok masyarakat (65,31%) namun tidak terdapat rincian lebih lanjut kelompok masyarakat yang dimaksudkan. Selanjutnya secara berturut-turut adalah badan/lembaga/organisasi (17,62%), instansi vertikal (14,20%), Sekolah (2,3%), KPU dan Panwaslu (0,48%).

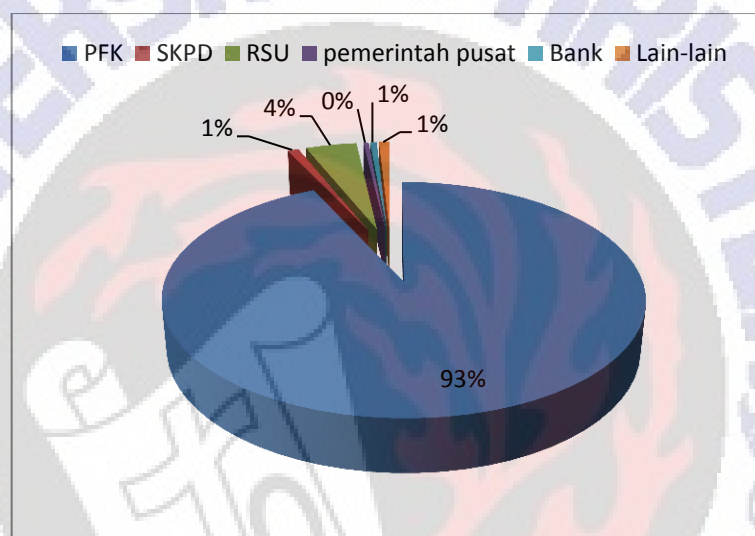
GRAFIK 1
PENERIMAAN BELANJA HIBAH



Pada grafik 2 dapat disimpulkan kewajiban terbesar pemerintah daerah di pulau Jawa pada tahun 2011 adalah Penghitungan Fihak Ketiga (PFK) yaitu sebesar 93%. PFK merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang

disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, iuran Askes, Taspen, dan Taperum (SAP 09). Dengan demikian PFK pada dasarnya adalah kewajiban berupa dana titipan yang besarnya tidak memperhitungkan kemampuan pengembalian kewajiban oleh Pemerintah daerah.

GRAFIK 2
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH



Pengujian Model Regresi berganda

Hasil pengujian dengan SPSS 16.0 menunjukkan hasil sebagaimana tabel 6

TABEL 6

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.299	1.633		-.795	.429
	POLCOM	2.144	1.199	.190	1.788	.077
	IR	5.506	2.319	.252	2.375	.020
	UTANG	21.972	26.300	.088	.835	.406

a. Dependent Variable: DISCLOSURE

Sumber: data sekunder diolah, 2013

Dari tabel 5 dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -1,299 + 2,144 X_1 + 5,506X_2 + 21,972X_3$$

Artinya, jika tidak ada kompetisi politik, *intergovernmental revenue* dan pembiayaan utang maka luas pengungkapan belanja hibah akan menurun. Sedangkan apabila rasio kompetisi politik meningkat, maka luas pengungkapan belanja hibah akan meningkat pula. Demikian pula halnya dengan peningkatan rasio *intergovernmental revenue* dan peningkatan rasio pembiayaan utang akan meningkatkan luas pengungkapan belanja hibah.

Uji t

TABEL 7

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.299	1.633		-.795	.429
	POLCOM	2.144	1.199	.190	**1.788	**0.077
	IR	5.506	2.319	.252	*2.375	*.020
	UTANG	21.972	26.300	.088	.835	.406

a. Dependent Variable: DISCLOSURE

Signifikan :*) pada tingkat 0,05, **) pada tingkat 0,10

Sumber: data sekunder diolah, 2013

Dari tabel 7 dapat disimpulkan bahwa kompetisi politik berpengaruh marjinal (pada tingkat signifikansi 10%) terhadap luas pengungkapan belanja hibah, yaitu t hitung (1,759) > t tabel (1,66). Sedangkan *intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan belanja hibah yaitu t hitung (2,375) > t tabel (1,989). Hal ini sesuai dengan penelitian Darmastuti, Setyaningrum (2012) yang menemukan pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial. Adapun pembiayaan utang tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan belanja hibah yaitu t hitung (0,835) < t tabel (1,989).

Uji F

TABEL 8

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20.000	3	6.667	2.813	.044 ^a
	Residual	194.326	82	2.370		
	Total	214.326	85			

a. Predictors: (Constant), UTANG, POLCOM, IR

b. Dependent Variable: DISCLOSURE

Sumber: data sekunder diolah, 2013

Dari tabel 8 dapat disimpulkan bahwa F hitung (2,813) > signifikansi (0,05) artinya, kompetisi politik, *intergovernmental revenue* dan pembiayaan utang secara bersama-sama berpengaruh terhadap luas pengungkapan belanja hibah.

Koefisien Determinasi

TABEL 9

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.305 ^a	.093	.060	1.539

a. Predictors: (Constant), UTANG, POLCOM, IR

Dari tabel 9 dapat disimpulkan bahwa Adjusted R Square adalah 6% . Jadi sumbangan pengaruh variable independen yaitu sebesar 6% sedangkan sisanya 94% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 7 dapat dilihat bahwa kompetisi politik memiliki nilai signifikansi sebesar 0,077 kurang dari 10%. Artinya, kompetisi politik berpengaruh marjinal terhadap luas pengungkapan belanja hibah. Hasil ini sesuai dengan penelitian Laswad (2005) yang menyatakan bahwa kepala daerah terpilih dari suatu pemerintahan daerah yang berkompetisi politik tinggi menanggung biaya jangka panjang yang tinggi dalam hal pemenuhan janji-

janji sebelum pemilihan. Hal ini berarti, kepala daerah yang lahir dari kompetisi politik yang tinggi akan terdorong untuk melakukan transparansi belanja hibah karena adanya tuntutan yang besar dari lawan-lawan politiknya. Seperti yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Cilacap yang memiliki rasio politik yang kompetitif yaitu sebesar 0,26 juga terdorong melakukan transparansi belanja hibah secara maksimal (6 item). Sedangkan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang memiliki rasio kompetisi politik sebesar 0,431 (tidak kompetitif) tidak terdorong melakukan transparansi belanja hibah (1 dari 6 item)

Hasil uji regresi kedua pada tabel 7 dapat dilihat bahwa *intergovernmental revenue* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,020 kurang dari 5%. Artinya, *intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan belanja hibah. Hasil ini sesuai dengan penelitian Darmastuti (2012) bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin suatu Pemerintah daerah bergantung terhadap transfer dari Pemerintah pusat, maka pemerintah daerah akan terdorong untuk melakukan transparansi belanja hibah. Seperti yang terjadi pada Pemerintah daerah kabupaten Sumenep yang memiliki rasio *intergovernmental revenue* paling tinggi yaitu sebesar 0,781 juga terdorong melakukan transparansi sebanyak 5 item dari 6 item yang ada. Sedangkan, Pemerintah Kota Bandung yang memiliki rasio *intergovernmental revenue* rendah sebesar 0,49 tidak terdorong melakukan transparansi (1 dari 6 item).

Sedangkan uji regresi ketiga menemukan bahwa pembiayaan utang terbukti tidak berpengaruh terhadap pengungkapan belanja hibah. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Darmastuti (2012). Kesimpulan ini diduga terkait dengan pembiayaan yang terjadi di Pemerintah daerah juga sangat kecil, dapat dilihat pada tabel 5 statistik deskriptif bahwa nilai rata-rata pembiayaan utang Pemerintah Daerah di Pulau Jawa tahun 2011 hanya sebesar 0,4% dimana nilai pembiayaan utang terendah adalah 0%. Artinya, bahwa kegiatan Pemerintah daerah yang dibiayai melalui hutang jumlahnya kecil dan tidak semua Pemerintah daerah melakukan pembiayaan kegiatannya melalui utang. Dengan demikian

pembiayaan utang tidak memberikan tekanan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan belanja hibah. Seperti yang terjadi pada Pemerintah daerah kabupaten Brebes, memiliki rasio pembiayaan utang yang besar yaitu 0,0045 tidak terdorong untuk melakukan transparansi belanja hibah (1 dari 6 item). Sedangkan, Pemerintah Kabupaten Bandung, yang memiliki rasio pembiayaan utang sebesar 0,00075 juga tidak terdorong melakukan transparansi belanja hibah (0 dari 6 item).

KESIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa :

1. *Intergovernmental revenue* berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan belanja hibah, dimana semakin sebuah Pemerintah daerah bergantung terhadap transfer dari Pemerintah pusat, maka pemerintah daerah akan terdorong untuk melakukan transparansi belanja hibah.
2. Kompetisi politik berpengaruh marginal terhadap luas pengungkapan belanja hibah, hal ini mengindikasikan bahwa kepala daerah yang lahir dari kompetisi politik yang tinggi akan terdorong untuk melakukan transparansi belanja hibah karena adanya tuntutan yang besar dari lawan-lawan politiknya.
3. Pembiayaan utang tidak terbukti mempunyai pengaruh terhadap luas pengungkapan belanja hibah. Artinya, semakin suatu Pemerintah daerah dapat mengembalikan hutang terhadap kreditor, pengungkapan hibah yang dilakukan oleh Pemerintah daerah tidak semakin luas.
4. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2011 yakni sebelum adanya ketentuan yang terinci terhadap pengungkapan belanja hibah maka terdapat luas pengungkapan belanja hibah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa masih rendah yakni dengan rata-rata sebesar 3,14 atau 52,33% dari 6 item yang seharusnya diungkapkan.

IMPLIKASI TEORI

Dalam penelitian ini menggunakan tiga variable yaitu kompetisi politik, *intergovernmental revenue* dan pembiayaan utang. Hasilnya *intergovernmental revenue* berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan belanja

hibah. Hasil ini sesuai dengan penelitian Darmastuti (2012) yang menemukan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial. Variable kedua yaitu kompetisi politik berpengaruh marjinal terhadap luas pengungkapan belanja hibah. Hasil ini sesuai dengan penelitian Laswad, (2005) yang menyatakan bahwa kepala daerah terpilih dari suatu pemerintahan daerah yang berkompetisi politik tinggi menanggung biaya jangka panjang yang tinggi dalam hal pemenuhan janji-janji sebelum pemilihan. Sedangkan pembiayaan utang terbukti tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan belanja hibah. Hasil ini tidak sesuai dengan Darmastuti (2012) yang menemukan bahwa pembiayaan utang berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial, ini dimungkinkan karena kegiatan Pemerintah daerah yang dibiayai melalui hutang jumlahnya kecil dan tidak semua Pemerintah daerah melakukan pembiayaan kegiatannya melalui utang dan adanya peraturan ketat di Indonesia terkait utang Pemerintah daerah yang menyebabkan utang di Pemerintah daerah jumlahnya sangat kecil serta kewajiban terbesar Pemerintah daerah adalah PFK (Perhitungan Pihak Ketiga) yang merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya sehingga PFK pada dasarnya adalah kewajiban berupa dana titipan yang besarnya tidak memperhitungkan kemampuan pengembalian kewajiban oleh Pemerintah daerah. Dengan demikian pembiayaan utang tidak dapat memberikan tekanan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan belanja hibah.

IMPLIKASI TERAPAN

Dalam penelitian ini dapat mengambil kesimpulan sebagai implikasi terapan antara lain :

1. Bagi Masyarakat, penelitian ini menjadi cermin pengungkapan belanja hibah yang dilakukan pemerintah daerah masih rendah maka, diharapkan Masyarakat ikut mengawasi penggunaan dana hibah agar tepat sasaran, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi korupsi belanja hibah.

2. Bagi Regulator diharapkan dapat membuat kebijakan belanja hibah yang ketat, tegas dan seragam sehingga pemerintah daerah dapat lebih transparan terkait belanja hibah dan dapat mengurangi adanya kasus kecurangan dan korupsi belanja hibah.

KETERBATASAN PENELITIAN

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah pemilukada di Indonesia tidak dilakukan serentak pada tahun yang sama dan kondisi di Indonesia yang memungkinkan partai politik untuk berkoalisi diduga dapat mendistorsi data kompetisi politik dalam penelitian ini. Yang kedua, sebagian data kursi pendukung kepala daerah yang diperoleh dalam penelitian ini tidak bersumber dari *website* resmi Pemerintah daerah (Jawa Timur dan Jawa Barat) sehingga validitas data kemungkinan rendah.

SARAN UNTUK PENELITIAN MENDATANG

Untuk penelitian mendatang diharapkan dapat membandingkan luas pengungkapan belanja hibah sebelum dan sesudah adanya Permendagri agar dapat mengetahui efektifitas dari keseragaman regulasi yang dibuat. Yang kedua, penelitian selanjutnya sebaiknya meneliti Pemda di seluruh Indonesia yang melakukan pemilukada pada tahun yang sama.

Daftar Pustaka

- Darmastuti, Setyanigrum, 2012. *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada tahun 2009”*. Simposium Nasional Akuntansi 15
- Ghozali, Imam, 2006. *Aplikasi Analisis Multivarite dengan SPSS*. Edisi Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Giroux, Gary dan Andrew J. McLelland, 2003. *“Governance Structures and Accounting at Large Municipalities”*. Journal of Accounting and Public Policy, 22 pp.203-230.
- Hilmi, Martani, 2012. *“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi”*
- Ingram, Robert W (1984). *“Economics Incentives and the Choice of State Government Accounting Practices”*. Journal of Accounting Research. Vol. 22. No. 1 pp 126-144
- Ingram, Robert W & Douglas V. De Jong 1987. *“The Effect of Regulation on Local Government Disclosure Practice”*. Journal of Accounting and Public Policy, vol. 6,issue 4, pp.245-269
- Jensen, M. C. dan W. H. Meckling. *The Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs ad ownership structure*. 1976
- Laswad, Fawzi, Fisher, Richard,dan Oyerele, Peter. (2005). *Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities*. Journal of Accounting and Public Policy 24. Pp 101-121.
- Lesmana, Sigit I. (2010). *“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Di Indonesia”*. Thesis, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Mulyana, Budi, 2006. *“Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol.2 No. 1, Mei 2006

Na'im, Ainun dan Fuad Rakhman. 2000. *Analisis Hubungan Antara Kelengkapan Laporan Keuangan Dengan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 15 No.1, hal 70-81.

Patrick, Patricia A. (2007). *The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government*. Ph.D. dissertation, The Pennsylvania State University, United States – Pennsylvania. Retrieved August 8, 2011, from Accounting & Tax Periodicals. (Publication No. AAT 3266180).

Sinaga(2011). “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet secara Sukarela Oleh Pemerintah Daerah*”

Suhardjanto, Djoko & Miranti, Laras (2009). “*Indonesian Environmental Reporting Index Dan Karakteristik Perusahaan*”. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia. Vol. 13, No. 1.

Sumarjo, Hendro. (2010). “*Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah*”. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

_____,Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____,Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2009.

_____, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____,UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

LAMPIRAN



LAMPIRAN I
DAFTAR PEMERINTAH DAERAH DI PULAU JAWA

NO	PEMERINTAH DAERAH
1	kabupaten bandung
2	kabupaten bandung barat
3	kabupaten bekasi
4	kabupaten bogor
5	kabupaten ciamis
6	kabupaten cianjur
7	kabupaten cirebon
8	kabupaten indramayu
9	kabupaten karawang
10	kabupaten kuningan
11	kabupaten majalengka
12	kabupaten purwakarta
13	kabupaten subang
14	kabupaten sukabumi
15	kabupaten sumedang
16	kabupaten tasikmalaya
17	kota bandung
18	kota bekasi
19	kota bogor
20	kota cimahi
21	kota depok
22	kota tasikmalaya
23	kabupaten bangkalan
24	kabupaten banyuwangi
25	kabupaten blitar
26	kabupaten bondowoso
27	kabupaten jember
28	kabupaten jombang
29	kabupaten kediri
30	kabupaten lamongan
31	kabupaten lumajang
32	kabupaten madiun
33	kabupaten magetan
34	kabupaten Mojokerto
35	kabupaten nganjuk
36	kabupaten ngawi

37	kabupaten pamekasan
38	kabupaten pasuruan
39	kabupaten ponorogo
40	kabupaten sidoarjo
41	kabupaten situbondo
42	kabupaten sumenep
43	kabupaten trenggalek
44	kabupaten tulungagung
45	kota kediri
46	kota madiun
47	kota malang
48	kota Mojokerto
49	kota pasuruan
50	kabupaten bantul
51	kabupaten gunung kidul
52	kabupaten kulon progo
53	kabupaten sleman
54	kota jogjakarta
55	kabupaten banyumas
56	kabupaten blora
57	kabupaten boyolali
58	kabupaten brebes
59	kabupaten cilacap
60	kabupaten demak
61	kabupaten jepara
62	kabupaten Karanganyar
63	kabupaten Kebumen
64	kabupaten kendal
65	kabupaten klaten
66	kabupaten kodus
67	kabupaten magelang
68	kabupaten pekalongan
69	kabupaten pematang
70	kabupaten purbalingga
71	kabupaten purworejo
72	kabupaten rembang
73	kabupaten semarang
74	kabupaten sragen
75	kabupaten sukoharjo
76	kabupaten tegal
77	kabupaten temanggung

78	kabupaten wonogiri
79	kabupaten wonosobo
80	kota magelang
81	kota salatiga
82	kota semarang
83	kota surakarta
84	kota tegal
85	kota serang
86	kota tangerang selatan



LAMPIRAN 2
TABEL PERHITUNGAN RASIO KOMPETISI POLITIK

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH KURSI PENDUKUNG KEPALA DAERAH TERPILIH	JUMLAH KURSI PARLEMEN	RASIO KOMPETISI POLITIK
1	kabupaten bandung	24	51	0,470588235
2	kabupaten bandung barat	15	50	0,3
3	kabupaten bekasi	19	50	0,38
4	kabupaten bogor	22	55	0,4
5	kabupaten ciamis	23	50	0,46
6	kabupaten cianjur	15	50	0,3
7	kabupaten cirebon	25	50	0,5
8	kabupaten indramayu	14	50	0,28
9	kabupaten karawang	20	50	0,4
10	kabupaten kuningan	30	50	0,6
11	kabupaten majalengka	11	51	0,215686275
12	kabupaten purwakarta	40	45	0,888888889
13	kabupaten subang	14	50	0,28
14	kabupaten sukabumi	19	50	0,38
15	kabupaten sumedang	22	50	0,44
16	kabupaten tasikmalaya	15	50	0,3
17	kota bandung	13	50	0,26
18	kota bekasi	29	49	0,591836735
19	kota bogor	18	45	0,4
20	kota cimahi	20	45	0,444444444
21	kota depok	16	50	0,32
22	kota tasikmalaya	13	44	0,295454545
23	kabupaten bangkalan	15	43	0,348837209
24	kabupaten banyuwangi	29	50	0,58
25	kabupaten blitar	21	50	0,42
26	kabupaten bondowoso	18	50	0,36
27	kabupaten jember	13	50	0,26
28	kabupaten jombang	23	50	0,46
29	kabupaten kediri	12	63	0,19047619
30	kabupaten lamongan	25	50	0,5
31	kabupaten lumajang	10	50	0,2
32	kabupaten madiun	9	45	0,2

33	kabupaten magetan	12	50	0,24
34	kabupaten Mojokerto	22	51	0,431372549
35	kabupaten nganjuk	25	50	0,5
36	kabupaten ngawi	14	47	0,29787234
37	kabupaten pamekasan	16	50	0,32
38	kabupaten pasuruan	10	50	0,2
39	kabupaten Ponorogo	14	49	0,285714286
40	kabupaten Sidoarjo	24	50	0,48
41	kabupaten Situbondo	13	44	0,295454545
42	kabupaten Sumenep	18	50	0,36
43	kabupaten Trenggalek	17	45	0,377777778
44	kabupaten Tulungagung	36	51	0,705882353
45	kota Kediri	6	31	0,193548387
46	kota Madiun	18	51	0,352941176
47	kota Malang	9	45	0,2
48	kota Mojokerto	12	50	0,24
49	kota Pasuruan	10	25	0,4
50	kabupaten Bantul	23	44	0,522727273
51	kabupaten Gunung Kidul	9	45	0,2
52	kabupaten Kulon Progo	15	39	0,384615385
53	kabupaten Sleman	16	50	0,32
54	kota Jogjakarta	20	39	0,512820513
55	kabupaten Banyumas	5	49	0,102040816
56	kabupaten Blora	21	44	0,477272727
57	kabupaten Boyolali	17	45	0,377777778
58	kabupaten Brebes	14	47	0,29787234
59	kabupaten Cilacap	13	50	0,26
60	kabupaten Demak	15	50	0,3
61	kabupaten Jepara	16	50	0,32
62	kabupaten Karanganyar	19	45	0,422222222
63	kabupaten Kebumen	15	50	0,3
64	kabupaten Kendal	8	50	0,16
65	kabupaten Klaten	25	50	0,5
66	kabupaten Kudus	17	45	0,377777778
67	kabupaten Magelang	28	50	0,56
68	kabupaten Pekalongan	7	45	0,155555556
69	kabupaten Pemasang	11	50	0,22
70	kabupaten Purbalingga	25	44	0,568181818
71	kabupaten Purworejo	10	44	0,227272727
72	kabupaten Rembang	8	45	0,177777778
73	kabupaten Semarang	22	45	0,488888889

74	kabupaten sragen	23	49	0,469387755
75	kabupaten sukoharjo	18	44	0,409090909
76	kabupaten tegal	15	49	0,306122449
77	kabupaten temanggung	11	45	0,244444444
78	kabupaten wonogiri	10	50	0,2
79	kabupaten wonosobo	17	44	0,386363636
80	kota magelang	10	25	0,4
81	kota salatiga	6	24	0,25
82	kota semarang	10	50	0,2
83	kota surakarta	15	39	0,384615385
84	kota tegal	15	30	0,5
85	kota serang	14	50	0,28
86	kota tangerang Selatan	35	48	0,729166667



LAMPIRAN 3

TABEL PERHITUNGAN RASIO *INTERGOVERMENTAL REVENUE*

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	TOTAL PENDAPATAN	DANA PERIMBANGAN DARI PUSAT	RASIO <i>INTERGOVERMENTAL REVENUE</i>
1	kabupaten bandung	2.453.398.748.635,70	1.511.351.819.966,00	0,616023718
2	kabupaten bandung barat	1.278.984.499.910,00	809.660.453.183,00	0,633049465
3	kabupaten bekasi	2.363.250.553.528	1.394.317.826.582	0,59
4	kabupaten bogor	3.451.755.115.305	1.898.465.313.418	0,55
5	kabupaten ciamis	1.599.795.624.968	1.087.861.024.978	0,68
6	kabupaten cianjur	1.771.273.333.445	974.200.333.395	0,55
7	kabupaten cirebon	1.781.243.088.712	1.099.402.437.492	0,617210781
8	kabupaten indramayu	1.672.637.775.550,00	451.612.199.398,50	0,27
9	kabupaten karawang	2.022.376.611.223,00	1.201.893.814.738,00	0,594297723
10	kabupaten kuningan	1.309.561.863.969	862.737.321.488	0,658798446
11	kabupaten majalengka	1.277.921.523.925	981.620.120.854	0,768138029
12	kabupaten purwakarta	995.695.195.966	623.943.372.553	0,626640939
13	kabupaten subang	1.405.974.623.364	1.003.141.704.663	0,713484929
14	kabupaten sukabumi	1.856.087.225.070,01	1.249.793.326.098	0,67334838
15	kabupaten sumedang	1.349.199.014.838,34	974.499.179.692,00	0,722279789
16	kabupaten tasikmalaya	1.505.485.957.229,00	1.043.973.470.058,00	0,693446169
17	kota bandung	3.115.296.523.905,00	1.526.495.296.713,45	0,49
18	kota bekasi	2.220.351.556.783,36	1.287.803.902.934,35	0,58
19	kota bogor	1.141.638.163.971,00	602.216.655.331,00	0,527502211
20	kota cimahi	721.746.717.931,61	422.164.126.956	0,584920051
21	kota depok	1.329.137.909.464,76	744.317.229.300,27	0,56

22	kota tasikmalaya	915.696.936.770,03	574.424.542.326	0,627308577
23	kabupaten bangkalan	1.129.785.814.822,82	757.704.629.872,00	0,670662191
24	kabupaten banyuwangi	1.450.320.872.078,87	982.023.260.117,00	0,677107583
25	kabupaten blitar	1.237.993.606.387,02	851.193.099.760,00	0,687558559
26	kabupaten bondowoso	966.956.040.944,09	660.619.810.828,00	0,683195288
27	kabupaten jember	1.882.283.782.606,79	1.250.834.951.524,00	0,664530483
28	kabupaten jombang	1.212.775.368.903,05	783.742.826.668,00	0,64623907
29	kabupaten kediri	1.302.740.679.758,38	902.036.633.519,00	0,692414575
30	kabupaten lamongan	1.321.524.956.897,31	859.140.092.542,00	0,650112651
31	kabupaten lumajang	1.017.748.039.906,24	710.230.674.177,00	0,697845288
32	kabupaten madiun	896.044.454.137,34	631.131.672.108,00	0,704353081
33	kabupaten magetan	951.987.638.823,04	653.395.770.340,00	0,686349007
34	kabupaten Mojokerto	1.115.661.434.574,32	744.309.091.165	0,667146025
35	kabupaten nganjuk	1.134.377.799.181,99	785.590.656.809,00	0,69253
36	kabupaten ngawi	1.130.520.645.637,19	788.496.961.639,00	0,697463567
37	kabupaten pamekasan	991.275.933.098,67	665.887.604.738,29	0,671747979
38	kabupaten pasuruan	1.379.806.557.968,47	1.076.249.115.215,41	0,78
39	kabupaten ponorogo	1.074.005.217.187,92	773.797.449.075,00	0,720478296
40	kabupaten sidoarjo	2.005.191.397.714,27	1.102.855.268.742,85	0,55
41	kabupaten situbondo	855.715.430.310,85	628.556.224.835,00	0,734538846
42	kabupaten sumenep	1.147.757.600.881,10	895.862.161.748,00	0,780532545
43	kabupaten trenggalek	948.217.914.496,88	650.484.599.699,00	0,686007499
44	kabupaten tulungagung	1.332.422.351.566,07	878.223.493.674,00	0,659117954
45	kota kediri	735.691.884.586,09	502.783.223.096,00	0,683415481
46	kota madiun	528.997.038.316,73	363.186.940.600	0,686557607

47	kota malang	1.102.655.771.801,76	646.871.523.364,00	0,586648653
48	kota Mojokerto	444.049.096.215,12	326.532.622.484,00	0,735352521
49	kota pasuruan	464.571.639.713,76	278.742.983.828,26	0,6
50	kabupaten bantul	1.180.547.112.432,41	717.123.249.859	0,607449921
51	kabupaten gunung kidul	965.826.232.915,18	667.004.718.903,00	0,690605304
52	kabupaten kulon progo	791.826.637.868,63	522.276.920.247	0,659584933
53	kabupaten sleman	1.311.473.547.855,47	753.889.009.957,00	0,574841186
54	kota jogjakarta	951.681.432.622,59	500.613.750.497,00	0,526030805
55	kabupaten banyumas	1.593.406.479.067,00	1.001.665.595.664,00	0,628631557
56	kabupaten blora	1.007.775.882.838	712.375.079.291,00	0,706878475
57	kabupaten boyolali	1.096.013.965.218,00	757.145.871.785,00	0,690817723
58	kabupaten brebes	1.315.223.944.822	922.817.611.612,00	0,701642952
59	kabupaten cilacap	1.639.234.442.510,82	1.067.910.580.231,00	0,651469096
60	kabupaten demak	1.132.135.924.724,00	659.397.666.239,00	0,582436836
61	kabupaten jepara	1.170.172.671.250,00	727.835.169.770,00	0,621989547
62	kabupaten karanganyar	1.043.597.972.167	679.252.564.524	0,650875704
63	kabupaten kebumen	1.273.275.623.110,00	856.994.931.591,00	0,673063173
64	kabupaten kendal	1.136.796.150.013,00	698.282.269.411,00	0,614254604
65	kabupaten klaten	1.364.124.811.662,00	920.807.670.268,00	0,67501717
66	kabupaten kudus	1.005.232.562.979,00	669.997.974.734,00	0,666510417
67	kabupaten magelang	1.114.474.635.599,00	798.006.244.160,00	0,716038049
68	kabupaten pekalongan	923.341.295.989,00	720.206.210.871,42	0,78
69	kabupaten pematang	1.188.521.215.764,00	781.421.087.284,00	0,657473402
70	kabupaten purbalangga	954.179.597.031	630.615.401.047	0,660898014
71	kabupaten purworejo	1.013.075.367.014	690.786.569.844	0,681870858

72	kabupaten rembang	873.464.930.507,62	572.039.837.614	0,654908764
73	kabupaten semarang	1.099.476.750.251,00	681.282.975.038	0,619642912
74	kabupaten sragen	1.094.585.823.239,00	728.600.173.450,00	0,66564006
75	kabupaten sukoharjo	1.015.438.257.161	657.247.355.925	0,647254869
76	kabupaten tegal	1.204.377.843.853,00	812.994.683.808,00	0,675032913
77	kabupaten temanggung	823.479.890.034,00	574.917.319.097,00	0,69815587
78	kabupaten wonogiri	1.166.580.278.614	803.583.007.863	0,688836442
79	kabupaten wonosobo	979.683.002.107,00	590.833.383.925,00	0,603086287
80	kota magelang	505.438.974.685,00	340.256.009.361,00	0,673189102
81	kota salatiga	478.173.510.921,00	308.552.525.942,00	0,645273146
82	kota semarang	2.053.919.562.042,00	1.170.734.150.363,94	0,57
83	kota surakarta	1.029.523.688.529,00	578.791.806.336,00	0,562193773
84	kota tegal	547.717.521.845	312.561.579.536,00	0,570662006
85	kota serang	1.322.429.273.871,00	773.980.562.441,00	0,585271801
86	kota tangerang selatan	1.494.990.970.240	896.994.582.144	0,6

LAMPIRAN 4

TABEL PERHITUNGAN RASIO PEMBIAYAAN UTANG

NO	NAMA PEMERINTAH DAERAH	TOTAL EKUITAS	TOTAL KEWAJIBAN	RASIO PEMBIAYAAN UTANG
1	kabupaten bandung	6.053.672.961.871	4.571.445.092,07	0,000755152
2	kabupaten bandung barat	1.577.335.479.132,90	920.997.567,00	0,000583895
3	kabupaten bekasi	5.322.604.992.290,59	2.621.089.602	0,000492445
4	kabupaten bogor	7.456.050.234.946	20.118.255.237	0,002698246
5	kabupaten ciamis	4.011.069.593.672	47.928.546.152	0,011949069
6	kabupaten cianjur	3.298.937.396.320,84	22.934.300.251,51	0,006952027
7	kabupaten Cirebon	2.686.216.466.981,92	15.643.466.414	0,005823606
8	kabupaten indramayu	3.514.324.597.959,59	39.703.185.679,62	0,011297529
9	kabupaten karawang	2.954.482.647.688,50	12.704.275.385,06	0,0043
10	kabupaten kuningan	2.181.642.914.074,43	43.603.108.793,00	0,019986364
11	kabupaten majalengka	2.528.760.108.092,51	45.968.662.279,41	0,01817834
12	kabupaten purwakarta	1.326.588.738.160,42	12.304.033.462,08	0,009274942
13	kabupaten subang	3.159.440.837.941,53	2.252.397.103,02	0,00071291
14	kabupaten sukabumi	3.515.944.873.241,79	5.259.086.405,00	0,001495782
15	kabupaten sumedang	1.938.907.642.317,29	41.883.590.663,65	0,021601643
16	kabupaten tasikmalaya	2.430.557.893.792,39	1.745.934.743,00	0,000718327
17	kota bandung	20.962.445.499.960,00	35.172.388.174,00	0,001677876
18	kota bekasi	4.618.281.005.583,11	21.507.919.988,55	0,004657127
19	kota bogor	4.122.985.983.610,21	11.758.021.346,82	0,002851822
20	kota cimahi	1.473.954.766.933,81	63.527.450.454,85	0,0431

21	kota depok	4.388.619.072.221,96	4.388.619.072,22	0,001
22	kota tasikmalaya	2.371.743.536.780,20	13.617.116.469,40	0,005741395
23	kabupaten bangkalan	2.118.140.579.615,69	6.559.804.071,00	0,003096964
24	kabupaten banyuwangi	3.763.642.662.580,55	3.850.997.898,81	0,00102321
25	kabupaten blitar	2.295.239.843.708,04	2.198.914.498,52	0,000958033
26	kabupaten bondowoso	1.848.028.869.301,98	7.583.762.079,41	0,004103703
27	kabupaten jember	3.870.423.151.254,84	16.100.556.780,37	0,004159896
28	kabupaten jombang	3.468.363.502.334,17	11.180.046.078,00	0,003223436
29	kabupaten Kediri	2.305.012.482.134,67	1.855.719.273,85	0,00080508
30	kabupaten lamongan	3.711.725.677.797,35	40.640.005.535,17	0,010949087
31	kabupaten lumajang	1.806.064.387.628,18	4.389.032.639,96	0,002430164
32	kabupaten madiun	4.778.029.026.743,97	6.230.434.739,33	0,001303976
33	kabupaten magetan	2.127.210.689.689,28	1.082.769.574,00	0,000509009
34	kabupaten mojosuro	2.354.615.115.805,24	268.812.327,33	0,000114164
35	kabupaten nganjuk	3.011.693.486.773,49	4.402.633.272,40	0,001461846
36	kabupaten ngawi	2.026.721.675.697,40	363.892.837,72	0,000179548
37	kabupaten pamekasan	1.795.456.452.322,13	15.253.690.391,44	0,008495717
38	kabupaten pasuruan	2.565.766.948.595,98	1.666.512.396,00	0,000649518
39	kabupaten ponorogo	2.371.089.718.361,53	14.958.798.903,88	0,006308829
40	kabupaten sidoarjo	6.905.810.280.988,66	9.779.832.643,00	0,001416175
41	kabupaten situbondo	1.519.831.757.785,58	640.871.512,05	0,000421673
42	kabupaten sumenep	2.398.863.688.682,08	765.374.387,94	0,000319057
43	kabupaten trenggalek	1.446.825.109.213,93	6.769.071.258,67	0,004678569
44	kabupaten tulungagung	1.629.913.747.753,92	358.814.176,00	0,000220143
45	kota Kediri	2.283.812.422.491,08	6.237.770.132,17	0,002731297

46	kota madiun	2.625.565.217.000	223.171.000,00	8,49992E-05
47	kota malang	4.365.762.389.349,61	5.815.363.352,88	0,001332038
48	kota Mojokerto	1.367.344.698.193,17	1.771.002,00	1,29521E-06
49	kota pasuruan	1.183.262.124.359,53	2.708.337.472,00	0,002288874
50	kabupaten bantul	2.630.304.220.488,46	498.749.567,52	0,000189617
51	kabupaten gunung kidul	1.543.971.831.246,82	779.848.792,09	0,000505093
52	kabupaten kulon progo	1.132.014.838.258,42	3.878.449.709,42	0,003426147
53	kabupaten sleman	2.829.436.711.000,00	5.077.088.211,00	0,001794381
54	kota Jogjakarta	3.338.699.467.852,00	5.110.199.378,65	0,001530596
55	kabupaten banyumas	3.595.148.697.136,67	55.206.316.204,38	0,015355781
56	kabupaten blora	1.687.188.956.902,19	16.675.367.632,69	0,009883521
57	kabupaten boyolali	1.422.739.238.401,31	279.422.451	0,000196398
58	kabupaten brebes	1.867.972.728.488,55	8.510.222.212,40	0,00455586
59	kabupaten cilacap	3.583.966.468.359,24	18.995.022.282,30	0,0053
60	kabupaten demak	1.835.228.123.254,56	3.780.931.462,00	0,002060197
61	kabupaten jepara	4.384.252.091.280,16	15.693.408.400	0,003579495
62	kabupaten Karanganyar	1.499.618.235.073	4.988.446.164,22	0,003326477
63	kabupaten kebumen	2.707.643.245.108,11	512.890.635,00	0,000189423
64	kabupaten Kendal	2.163.061.896.000,00	10.722.777.585,20	0,004957222
65	kabupaten klaten	5.632.019.423.013,44	17.629.377.828,00	0,003130205
66	kabupaten kodus	2.252.248.535.184,80	1.498.114.366,44	0,000665164
67	kabupaten magelang	2.033.818.550.912,62	245.383.980,00	0,000120652
68	kabupaten pekalongan	1.947.792.536.787,75	5.717.799.806,12	0,002935528
69	kabupaten pemalang	2.142.211.115.855,79	6.076.076.587,89	0,002836358
70	kabupaten purbalingga	1.604.322.862.749,00	13.503.587.006	0,008417001

71	kabupaten purworejo	1.627.204.945.586,85	3.454.588.790,89	0,00212302
72	kabupaten rembang	1.212.644.103.693,27	26.771.593.298,23	0,022077041
73	kabupaten semarang	1.634.951.736.038,84	3.409.870.776,57	0,002085609
74	kabupaten sragen	1.880.811.419.912,53	4.049.832.303,00	0,002153237
75	kabupaten sukoharjo	1.283.488.515.174,38	35.535.966.789,11	0,027687016
76	kabupaten tegal	1.975.434.468.681,00	2.187.011.800,24	0,001107104
77	kabupaten temanggung	2.042.362.083.596,00	4.327.116.473,00	0,002118682
78	kabupaten wonogiri	2.763.732.612.300,14	215.056.834,00	0,0000778
79	kabupaten wonosobo	1.864.282.582.253,73	359.600.932,00	0,00019289
80	kota magelang	1.883.455.740.350,03	6.683.897.126,00	0,003548741
81	kota salatiga	1.491.262.707.652,40	2.961.623.404,00	0,001985984
82	kota semarang	5.689.136.988.289,18	35.610.495.655,82	0,006259384
83	kota Surakarta	6.551.904.736.900,81	47.226.493.994,13	0,007208056
84	kota tegal	1.657.162.241.108,00	13.759.043.281,25	0,008302774
85	kota serang	2.873.263.678.854,44	2.758.617.808,00	0,000960099
86	kota tangerang selatan	2.602.755.240.492,47	22.356.075.423	0,008589388

LAMPIRAN 5

TABEL PENGUNGKAPAN LUAS PENGUNGKAPAN BELANJA HIBAH

No	Kabupaten/ kota	Rincian yang diungkapkan	Luas Pengungkapan
1	kabupaten bandung	-	0
2	kabupaten bandung barat	menurut organisasi	3
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
3	kabupaten bekasi	-	0
4	kabupaten bogor	menurut organisasi	4
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		penjelasan lain untuk <i>full disclosure</i>	
5	kabupaten ciamis	menurut organisasi	2
		menurut program dan kegiatan	
6	kabupaten cianjur	menurut organisasi	3
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut urusan pemerintahan	
7	kabupaten cirebon	menurut program dan kegiatan	1
8	kabupaten indramayu	menurut fungsi dan klasifikasi belanja	2
		menurut program dan kegiatan	
9	kabupaten karawang	menurut organisasi	4
		menurut program dan kegiatan	
		menurut belanja langsung dan tidak langsung	

		penjelasan lain untuk <i>full disclosure</i>	
10	kabupaten kuningan	menurut organisasi	6
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
		menurut belanja langsung dan tidak langsung	
		penjelasan lain untuk <i>full disclosure</i>	
11	kabupaten majalengka	menurut program dan kegiatan	2
		menurut urusan pemerintahan	
12	kabupaten purwakarta	menurut organisasi	4
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		penjelasan lain untuk <i>full disclosure</i>	
13	kabupaten subang	menurut urusan pemerintahan	1
14	kabupaten sukabumi	menurut organisasi	3
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
15	kabupaten sumedang	menurut fungsi dan klasifikasi belanja	4
		menurut program dan kegiatan	
		menurut belanja langsung dan tidak langsung	
		penjelasan lain untuk <i>full disclosure</i>	
16	kabupaten tasikmalaya	menurut fungsi dan klasifikasi belanja	3
		menurut program dan kegiatan	
		menurut belanja langsung dan tidak langsung	
17	kota bandung	menurut program dan kegiatan	1

18	kota bekasi	menurut organisasi	4
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
19	kota bogor	menurut organisasi	1
20	kota cimahi	menurut organisasi	4
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		penjelasan lain untuk <i>full disclosure</i>	
21	kota depok	menurut organisasi	3
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
22	kota tasikmalaya	menurut organisasi	1
23	kabupaten bangkalan	menurut organisasi	3
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
24	kabupaten banyuwangi	menurut organisasi	5
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
		menurut belanja langsung dan tidak langsung	
25	kabupaten blitar	menurut organisasi	4
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
		menurut belanja langsung dan tidak langsung	

26	kabupaten bondowoso	menurut organisasi	3
		menurut program dan kegiatan	
		penjelasan lain untuk <i>full disclosure</i>	
27	kabupaten jember	menurut organisasi	1
28	kabupaten jombang	menurut organisasi	4
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
29	kabupaten kediri	menurut organisasi	2
		menurut urusan pemerintahan	
30	kabupaten lamongan	menurut organisasi	5
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
		menurut belanja langsung dan tidak langsung	
31	kabupaten lumajang	menurut organisasi	2
		menurut program dan kegiatan	
32	kabupaten madiun	menurut organisasi	5
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
		penjelasan lain untuk <i>full disclosure</i>	
33	kabupaten magetan	menurut organisasi	4
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	

		menurut belanja langsung dan tidak langsung	
34	kabupaten mojokerto	menurut organisasi	1
35	kabupaten nganjuk	menurut organisasi	5
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
		penjelasan lain untuk <i>full disclosure</i>	
36	kabupaten ngawi	menurut organisasi	3
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut urusan pemerintahan	
37	kabupaten pamekasan	menurut organisasi	5
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
		menurut belanja langsung dan tidak langsung	
38	kabupaten pasuruan	menurut organisasi	2
		menurut urusan pemerintahan	
39	kabupaten ponorogo	menurut organisasi	5
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
		menurut belanja langsung dan tidak langsung	
40	kabupaten sidoarjo	menurut organisasi	3
		menurut urusan pemerintahan	
		menurut belanja langsung dan tidak langsung	

41	kabupaten situbondo	menurut organisasi	3
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
42	kabupaten sumenep	menurut organisasi	5
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
		menurut belanja langsung dan tidak langsung	
43	kabupaten trenggalek	menurut organisasi	1
44	kabupaten tulungagung	menurut organisasi	3
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
45	kota kediri	menurut organisasi	2
		menurut program dan kegiatan	
46	kota madiun	menurut organisasi	4
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
47	kota malang	menurut organisasi	2
		menurut urusan pemerintahan	
48	kota Mojokerto	menurut organisasi	5
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
		penjelasan lain untuk <i>full disclosure</i>	

49	kota pasuruan	menurut organisasi	5
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
		menurut belanja langsung dan tidak langsung	
50	kabupaten bantul	menurut organisasi	3
		menurut urusan pemerintahan	
		menurut belanja langsung dan tidak langsung	
51	kabupaten gunung kidul	menurut organisasi	5
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
		penjelasan lain untuk <i>full disclosure</i>	
52	kabupaten kulon progo	menurut organisasi	4
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
53	kabupaten sleman	menurut organisasi	1
54	kota jogjakarta	menurut organisasi	2
		menurut urusan pemerintahan	
55	kabupaten banyumas	menurut organisasi	3
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
56	kabupaten blora	menurut organisasi	4
		menurut program dan kegiatan	

		menurut urusan pemerintahan	
		menurut belanja langsung dan tidak langsung	
57	kabupaten boyolali	menurut organisasi	5
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
		penjelasan lain untuk <i>full disclosure</i>	
58	kabupaten brebes	menurut urusan pemerintahan	1
59	kabupaten cilacap	menurut organisasi	6
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
		menurut belanja langsung dan tidak langsung	
		penjelasan lain untuk <i>full disclosure</i>	
60	kabupaten demak	menurut organisasi	5
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
		menurut belanja langsung dan tidak langsung	
61	kabupaten jepara	menurut organisasi	6
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
		menurut belanja langsung dan tidak langsung	
		penjelasan lain untuk <i>full disclosure</i>	

62	kabupaten karanganyar	menurut organisasi	2
		menurut program dan kegiatan	
63	kabupaten kebumen	menurut organisasi	3
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
64	kabupaten kendal	menurut urusan pemerintahan	1
65	kabupaten klaten	menurut organisasi	2
		menurut urusan pemerintahan	
66	kabupaten kudus	menurut organisasi	3
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
67	kabupaten magelang	menurut organisasi	6
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
		menurut belanja langsung dan tidak langsung	
		penjelasan lain untuk <i>full disclosure</i>	
68	kabupaten pekalongan	menurut organisasi	4
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
69	kabupaten pematang	menurut organisasi	5
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	

		menurut belanja langsung dan tidak langsung	
70	kabupaten purbalingga	menurut organisasi	5
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
71	kabupaten purworejo	menurut belanja langsung dan tidak langsung	2
		menurut organisasi	
		menurut urusan pemerintahan	
72	kabupaten rembang	menurut organisasi	4
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
73	kabupaten semarang	menurut organisasi	2
		menurut urusan pemerintahan	
74	kabupaten sragen	menurut organisasi	1
75	kabupaten sukoharjo	menurut organisasi	3
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
76	kabupaten tegal	menurut organisasi	3
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut urusan pemerintahan	
77	kabupaten temanggung	menurut organisasi	5
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	

		penjelasan lain untuk full disclosure	
78	kabupaten wonogiri	menurut organisasi	2
		menurut program dan kegiatan	
79	kabupaten wonosobo	menurut organisasi	3
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
80	kota magelang	menurut organisasi	4
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut urusan pemerintahan	
		menurut belanja langsung dan tidak langsung	
81	kota salatiga	menurut organisasi	3
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
82	kota semarang	menurut organisasi	5
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	
		penjelasan lain untuk <i>full disclosure</i>	
83	kota surakarta	menurut organisasi	1
84	kota tegal	menurut organisasi	1
85	kota serang	menurut urusan pemerintahan	1
86	kota tangerang selatan	menurut organisasi	6
		menurut fungsi dan klasifikasi belanja	
		menurut program dan kegiatan	
		menurut urusan pemerintahan	

		menurut belanja langsung dan tidak langsung	
		penjelasan lain untuk <i>full disclosure</i>	



LAMPIRAN 6

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		86
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.51843512
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.071
	Negative	-.060
Kolmogorov-Smirnov Z		.662
Asymp. Sig. (2-tailed)		.772

a. Test distribution is Normal.

b. Uji Mutikoleniaritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.299	1.633		-.795	.429		
POLCOM	2.144	1.199	.190	1.788	.077	.981	1.019
IR	5.506	2.319	.252	2.375	.020	.980	1.020
UTANG	21.972	26.300	.088	.835	.406	.998	1.002

c. Uji Heteroskastisitas (Uji Park)

TABEL 12

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.430	2.102		.205	.838
	POLCOM	-.106	1.543	-.008	-.069	.945
	IR	-.874	2.983	-.033	-.293	.770
	UTANG	-14.693	33.840	-.048	-.434	.665

a. Dependent Variable: Ln_res2



